

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Bendungan Jatigede merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencapai tujuan utama dalam pembangunan pertanian, yaitu meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk menyediakan sistem irigasi yang dapat mengatasi kekurangan air pada musim kemarau, serta mengelola banjir pada musim penghujan. Meskipun direncanakan sejak tahun 1963, pembangunan bendungan ini baru terealisasi pada pertengahan tahun 2015. Selain manfaat irigasi, bendungan ini diharapkan dapat memberikan dukungan air bagi lahan pertanian dan mengatasi persoalan kekeringan serta banjir. Namun, dampak negatifnya adalah pengambilalihan lahan yang luas, termasuk lahan pertanian dan pemukiman warga di lima kecamatan dan 26 desa, seperti Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja, dan Cisitau.

Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat petani harus mencari tempat baru untuk tinggal dan mencari mata pencaharian baru, sehingga menimbulkan tantangan adaptasi yang signifikan bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan pertanian. Pembangunan Bendungan Jatigede adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan produksi pertanian guna mencapai ketahanan pangan. Tujuan utama dari pembangunan bendungan ini adalah untuk menyediakan sistem irigasi sehingga pada saat musim kemarau, petani tidak perlu khawatir menghadapi kekurangan air. Pembangunan

bendungan Jatigede telah direncanakan sejak tahun 1963 dan baru berhasil direalisasikan pada pertengahan tahun 2015. Selain berfungsi sebagai sistem irigasi, tujuan lain dari pembangunan bendungan ini adalah untuk mengatasi masalah kekeringan saat musim kemarau dan mengelola banjir saat musim penghujan, serta diharapkan dapat menjadi penyedia air bagi lahan pertanian.

Meskipun pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan krusial masyarakat akan air dan meningkatkan sektor pertanian, pembangunan bendungan Jatigede juga berdampak besar terhadap lahan pertanian, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat petani. Oleh karena itu, pembangunan bendungan Jatigede membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di sekitar wilayah bendungan tersebut. Menurut pengamatan dari dinas pertanian Jatigede, untuk pembangunan bendungan Jatigede diperlukan lahan seluas 4.891,13 hektar yang mencakup lima kecamatan dan dua puluh enam desa, termasuk Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja, dan Cisit.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan ini adalah lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Dampaknya, lahan pertanian dan permukiman penduduk menjadi wilayah yang tergenang air, yang berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat sekitar, khususnya para petani yang bergantung pada lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penduduk dari lima kecamatan yang terkena dampak pembangunan harus mencari tempat tinggal baru, sehingga mereka juga perlu mencari mata pencaharian baru. Namun demikian, mereka harus beradaptasi dengan perubahan tersebut

karena mereka telah lama berkecimpung dalam bidang pertanian dan memiliki keahlian di bidang tersebut.

Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan Bendungan Jatigede. Di Kecamatan Jatigede sendiri, terdapat empat desa yang wilayahnya digunakan untuk pembangunan bendungan Jatigede, yaitu Desa Jemah, Desa Ciranggem, Desa Mekarasih, dan Desa Sukakersa, dengan luas wilayah yang berbeda-beda

Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur Bandung. Kabupaten ini terkenal dengan keindahan alamnya serta potensi ekonominya yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, pariwisata, dan usaha kecil menengah (UKM). Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sekitar 1.522,20 km² dengan jumlah penduduk yang cukup besar, menjadikannya salah satu kabupaten yang penting di Jawa Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sumedang telah berfokus pada pengembangan sektor UKM sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus adalah sektor kuliner, yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan menarik wisatawan.

Kecamatan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Indonesia, memiliki populasi sekitar 23.000 orang, dimana mayoritas dari mereka adalah petani. Pembangunan Waduk Jatigede, yang merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia, telah

mengubah sebagian besar lahan pertanian menjadi non-pertanian dan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan.

Waduk Jatigede adalah sebuah waduk serbaguna yang dibangun dengan beberapa tujuan, antara lain: (1) untuk mengairi lahan pertanian seluas 90.000 hektar sawah guna meningkatkan produksi padi di wilayah utara Indramayu, Majalengka, dan Cirebon, (2) sebagai penyedia air bersih untuk Kabupaten Sumedang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan kawasan Balongan dengan kapasitas mencapai 3.500 liter per detik, (3) untuk mengendalikan banjir saat musim hujan, (4) sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 110 megawatt, dan (5) sebagai objek pariwisata.

Sejak mulai diisi air pertama kali pada tanggal 31 Agustus 2015, potensi pariwisata di kawasan Waduk Jatigede mulai terwujud. Seiring dengan tingginya tingkat air di waduk, jumlah wisatawan yang datang meningkat, terutama pada hari libur. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengembangkan wisata di sekitar waduk Jatigede, yang menghasilkan beberapa obyek wisata di berbagai desa. Saat ini, sudah ada empat desa wisata yang mulai dikembangkan di sekitar waduk Jatigede, yakni Desa Pakualam dan Karangpakuan di Kecamatan Darmaraja, serta Desa Cijeungjing dan Jemah di Kecamatan Jatigede. (Djuwendah, E., Wulandari, E., & Rachmawati, E. (2019).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang adalah lembaga pemerintah yang

berperan penting dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor ini, dengan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha kecil seperti pertanian, kerajinan, dan industri rumahan. Pemberdayaan umkm oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) di Kabupaten Sumedang menjadi sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Dengan memberdayakan UMKM, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan akses permodalan, fasilitasi pemasaran produk, pemberian bantuan teknologi, dan penguatan jaringan kemitraan usaha. Dengan adanya pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Usaha Kecil dan Menengah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan jual beli serta mengembangkan keterampilan dalam menggunakan jaringan internet, terutama untuk pemasaran produk secara online. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi atau oleh pelaku usaha adalah melalui *E-Commerce*, yang merupakan *platform* penjualan secara

online. *E-Commerce* dianggap sebagai solusi bagi generasi milenial dan menjadi aplikasi belanja yang mempermudah pembeli dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi informasi, khususnya *E-commerce*, telah terbukti bermanfaat dalam mempromosikan produk dan jasa. Saat ini, tren bisnis telah memasuki era Industri 4.0 di mana internet dan online menjadi bagian yang tak terpisahkan. Melalui *E-Commerce*, pelaku usaha dapat menjual produk kepada konsumen secara online. Proses jual beli yang melibatkan internet dikenal dengan istilah *E-Commerce*. (Karniawati, N., Adibowo, R. 2023).

UMKM merupakan kelompok usaha yang paling banyak di Indonesia. Guna meningkatkan daya saing UMKM, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Untuk memfasilitasi peserta pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha perlu adanya pendampingan yang diberikan oleh Tenaga Pendamping. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya produktif serta Meningkatkan kualitas usaha UMKM secara inovatif, kreatif dan produktif melalui pelaporan yang baik bagi para tenaga pendamping UMKM di Jawa Barat. Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui proses bimtek, konsultasi dan supervise laporan bulanan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah tersusunnya jadwal pendampingan bagi pendampin UMKM, serta hasil dan kemajuan sebelum dan sesudah pendampingan pasca pelatihan diikuti Indikator Keberhasilan. (D, Kurniasih. 2021)

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan

masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebuah upaya terkoordinasi dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Upaya ini merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha besar (dunia usaha), dan masyarakat secara umum.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam menumbuhkan iklim usaha yang menguntungkan bagi UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan akses permodalan, serta insentif-insentif lainnya yang dapat mempermudah operasional. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan program-program pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar, dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses pasar bagi produk-produk, baik sebagai pemasok maupun sebagai mitra bisnis. Perusahaan-perusahaan besar juga dapat memberikan bimbingan teknis, *transfer* teknologi, serta membangun kemitraan strategis dengan UMKM. Masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah baik sebagai konsumen yang mendukung produk-produk usaha kecil mikro dan menengah maupun sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung pertumbuhan

UMKM, seperti lembaga keuangan mikro, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Pelaksanaan program pemasaran produk dilaksanakan pada tahun 2022 dan program pelatihan digital dilaksanakan pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2024 ini belum melakukan kegiatan apapun.

Adapun temuan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang telah melakukan program pelatihan digital marketing dan pelatihan pemasaran produk, namun pada pelaksanaannya program tersebut belum terlaksana secara rutin tiap tahun karena terkendali oleh anggaran dan waktu untuk melakukan program tersebut.

Lalu adapun bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah dengan memberikan sebuah box container pada 2023 untuk para pelaku UMKM di Kecamatan Jatigede melakukan kegiatan jual beli namun pada kenyataannya box container tersebut tidak dipakai oleh masyarakat kecamatan jatigede karena mereka masih mencari untuk menjaga dan mau diperuntukan jual apa. Masyarakat jatigede masih nyaman dengan apa yang sudah mereka jalani dan menghiraukan bantuan box container dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

Identifikasi permasalahan dalam pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi merupakan langkah krusial dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu lembaga atau organisasi. Dengan memahami secara mendalam tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan serta fungsi-fungsi yang harus dipenuhi. Hal ini

menjadi pondasi untuk merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa tujuan utama dari setiap lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan dapat tercapai secara optimal. berikut merupakan permasalahan yang terjadi.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Pemasalahan dalam Bidang Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi 4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperas
2	Permasalahan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha 2. Database UMKM belum tersedia secara akurat 3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing 4. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan 5. Cakupan pemasaran masih terbatas
3	Permasalahan dalam Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pendataan supplier distributor 2. Masih rendahnya pengawasan di bidang perdagangan 3. Masih rendahnya pembinaan pelaku usaha
4	Permasalahan dalam Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana pendukung industri 2. Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi (halal, PIRT) 3. Belum akuratnya data IKM (Industri Kecil Menengah)
5	UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pasar-pasar illegal 2. Adanya reparatir illegal

(Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang (2019-2023))

Melalui upaya pemberdayaan yang sinergis ini, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Mereka akan memiliki daya

saing yang lebih kuat, akses pasar yang lebih luas, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Pada akhirnya, pemberdayaan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya membantu beberapa kendala yang dihadapi terutama kaitannya dengan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah dari Bank Sumedang. Kemudian disahkan nya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten memiliki Program KURDa Bank Sumedang yang merupakan inisiatif untuk mendorong perkembangan ekonomi di Kabupaten Sumedang dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui program ini, Bank Sumedang berupaya memberikan dukungan keuangan kepada UMKM dengan suku bunga yang rendah, yakni sebesar 3 persen dalam satu tahun. Harapannya, akses permodalan yang lebih mudah ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan usaha, terutama bagi para pelaku usaha kecil di Sumedang.

Dengan suku bunga yang terjangkau, diharapkan UMKM, termasuk para pelaku usaha kecil, dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap modal usaha yang mereka butuhkan. Hal ini diharapkan akan menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang secara keseluruhan. Program seperti ini penting dalam

memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2019 - 2023 Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Maka fokus penelitian masalah yang terjadi antara lain :

1. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh pelaku usaha di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur TI seperti koneksi internet yang lambat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait TI, biaya implementasi yang tinggi, kurangnya kesadaran akan manfaat TI dalam bisnis, dan kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam pengembangan dan pelatihan terkait TI.
2. Permasalahan terkait *database* UMKM yang belum tersedia secara akurat di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, menciptakan hambatan dalam pemahaman profil dan kebutuhan UMKM, kesulitan dalam merencanakan program bantuan dan pelatihan yang efektif, serta menyulitkan monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan, hal ini juga mengurangi efisiensi dalam pelayanan dan dukungan kepada UMKM serta menghambat perencanaan strategis untuk pengembangan ekonomi wilayah.

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang pertama dilakukan oleh Karniawati, N., Adibowo, R., Triwahyuni, D., (2023) yang berjudul Peningkatan Kualitas Ukm Kuliner Saung Ambu 711 Berbasis *E-Commerce* Di Desa Cipagalo Kabupaten Bandung. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa

terdapat dua permasalahan utama pada mitra. Pertama, masalah pemasaran yang diatasi melalui peningkatan pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Program ini melibatkan peningkatan kemampuan mitra melalui pelatihan e-commerce. Kedua, masalah manajemen usaha yang diatasi melalui pendampingan manajemen usaha serta pembelian barang yang mendukung operasional usaha mitra.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jaya, N. (2021). Dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu Untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah setempat akan secara penuh memperhatikan hal ini. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menyediakan mesin untuk pelaku UMKM, terutama yang berkaitan dengan proses pengepakan atau pengemasan produk. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk UMKM yang dipasarkan karena kesulitan dalam hal ini merupakan salah satu faktor utama yang membatasi potensi maksimal UMKM di pasar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Idayu, R. (2021). Dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, menghadapi sejumlah permasalahan, seperti kendala dalam permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, infrastruktur,

pemanfaatan teknologi, serta aspek sosial dan ekonomi. Karena itu, pengembangan UMKM di wilayah tersebut belum optimal. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi hal ini adalah Strategi SO (pertumbuhan). Strategi ini fokus pada pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan daya saingnya secara keseluruhan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yunarni (2020). Dengan judul penelitian Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus telah memberikan dampak positif bagi Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Mandalika. Omzet penjualan dan jumlah pelanggan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkat karena lonjakan kunjungan wisatawan ke Mandalika setelah gempa bumi. Pemerintah telah memulai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku usaha, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, strategi telah dipersiapkan untuk mengoptimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menghadapi ajang MotoGP 2021 yang bergengsi.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama sama meneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengeksplorasi konteks lokal yang spesifik, yaitu Kecamatan Jatigede di Kabupaten Sumedang, serta membahas upaya konkret dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM di wilayah

tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pengembangan ekonomi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha, untuk merancang kebijakan dan program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki urgensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal, serta potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur dan praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang , “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti pada Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemungkinan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Penguatan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Perlindungan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang?

4. Bagaimana Penyokongan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang?
5. Bagaimana Pemeliharaan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih menganalisa dan mengetahui tentang Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, dengan perumusan masalah yang peneliti temukan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemungkinan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Dalam Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui Penguatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Dalam Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Dalam

Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.

4. Untuk mengetahui Penyokongan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Dalam Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.
5. Untuk mengetahui Pemeliharaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Dalam Mensejahterakan Pelaku Usaha Di Kecamatan Jatigede Di Kabupaten Sumedang.

1.4 Kegunaan dan Penelitian

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengemukakan adanya kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori strategi sebagai sarana pengembangan Ilmu Pemerintahan yang secara teoritis dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan kepada kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan

Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang. Kegunaan secara praktis kemudian terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam berjalannya pemberdayaan masyarakat dalam suatu Instansi Disamping itu, peneliti ingin mengetahui atau membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan ide baru bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) Kabupaten Sumedang untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPUKMPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang Usaha Kecil Mikro Menengah.

c. Bagi Program studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah di masa mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang sedang

atau akan berkunjung ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian.